

Fintech Ilegal Masih Marak

Tanggal : Selasa , 29 September 2020
Media : Pikiran Rakyat
Halaman : 12
Wartawan : Yulistyne Kasumaningrum
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Tongam Lumban Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi OJK)
Rubrik : Ekonomi
Topik : Fintech Ilegal

Fintech Ilegal Masih Marak

Sejak 2018, 2.840 Pinjaman Ilegal Distop



SATGAS Waspada Investasi kembali menemukan 126 fintech peer to peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi, dan 50 perusahaan gadai tanpa izin. Fintech ilegal yang telah ditutup sejak tahun 2018 hingga September 2020 mencapai 2.840 entitas.*

BANDUNG, (PR)-

Sejumlah penawaran pinjaman (lending) ilegal dan investasi tanpa izin masih banyak bermunculan dan mengincar kalangan masyarakat yang terdampak pendapatannya akibat pandemi Covid-19.

Tercatat hingga September, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 126 fintech peer to peer lending ilegal, serta 32 entitas investasi, dan 50 perusahaan gadai tanpa izin. Adapun total fintech ilegal yang telah ditutup Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak tahun 2018 hingga September 2020 mencapai 2.840 entitas.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, Satgas masih menemukan penawaran fintech lending ilegal dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini.

Hal tersebut tentunya menjadi perhatian pihaknya dan berharap masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran pinjaman dana dari fintech peer to peer lending ilegal dan tawaran investasi dari entitas yang tidak memiliki izin sesuai usahanya.

"Fintech lending dan tawaran investasi ilegal, dikenalnya hanya bikin rugi dan bukanlah solusi ba-

gi masyarakat," katanya melalui keterangan pers yang dikutip "PR", Senin (28/9/2020).

Ia memaparkan, pinjaman dari fintech lending ilegal selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam. Akses data kontak tersebut digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Diblokir

Semua temuan tersebut, lanjut Tongam, identitasnya sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler.

Selain itu, Satgas juga menyampaikan laporan informasi identitas fintech lending ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

"Kami juga mengapresiasi kebijakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK melakukan penawaran melalui SMS sesuai dengan ketentuan OJK sehingga bisa dipastikan bahwa jika ada penawaran pinjaman dana fintech lending melalui SMS berarti itu dilakukan oleh fintech lending ilegal yang sebaiknya dihindari," katanya.

Selain kegiatan Fintech peer-to-peer lending ilegal, SWI juga menghentikan 32 entitas yang

diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat karena melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Kemudian, banyak kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin. Salah satu entitas yang diminta ditutup adalah aplikasi Alimama Indonesia (almm.qdhtml.net) yang belakangan ramai diberitakan karena diduga melakukan penipuan dengan modus penghimpunan dana untuk mendapatkan bonus belanja.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan," katanya.

Kemudian, lanjut Tongam, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar dan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yulistyne Kasumaningrum)***

Imbauan Satgas Waspada Investasi:

1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*